



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ABDURAHMAN ADISAPUTERA
2. Jabatan : WAKIL DIREKTUR BIDANG UMUM DAN KEUANGAN PPS
3. NHK : 733675

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 910.000.000

1. Tanah Seluas 348 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 335 m2/192 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 566.800.000

1. MOBIL, HONDA FREED GB 31.5 E AT (CKD) Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
2. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 255.000.000
3. MOTOR, HONDA NC11C1CA/T Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 7.800.000
4. MOTOR, HONDA P5E02R22M1M-T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
5. MOTOR, HONDA NF11A1CM T Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
6. MOTOR, KAWASAKI ZX250K Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 109.420.276



F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.586.220.276

III. HUTANG

Rp. 300.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.286.220.276

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.